

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan Kesatu. Reflika Aditama. Bandung.
- Dwi Supriyadi, dkk. 2017. *Ensiklopedia antikorupsi Indonesia*. Borobudur inspirasi nusantara. Surakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. PT.Refika Aditama. Bandung.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*. Rajawali Pers. Depok. Ed.1. Cetakan ke-5.
- Jonaedi Effendi dan John Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Jakarta.
- Kadir Husin dan Budi Husin. 2016. *System Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Moch Anwar. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Alumni Bandung.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet 1, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- P.A.F.Lamintang. 2013. *dasar dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2007. *hukum pidana kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soejono dan H.Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.
- Sudaryono, Natangsa Subakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan Ruu KUHP*. Muhammaadiyah University Presss. Surakarta
- Syarif Mappiasse. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT.Umitqha Ukhuwah Grafika. Makassar.

JURNAL

Aryana, I Wayan Putu Sucana. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19”. Jurnal Yustitia. 2020

Elias Zadrack Leasa. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Belo 6. Universitas Pattimura. Nomor 1 Agustus 2020

Sandro Unas. “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi” Lex Et Societatis. vol. VII. Nomor 4 April 2019.

Santiago Faisal. *Strategi Pemberantasan kejahatan Korupsi*. Kajian Lega. Sosiologis Jurnal Lex Publica. Vol 1, No. 1 2014.

Toni Yuri Rahmanto. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 19 No.1 Maret 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ARTIKEL ONLINE

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim> Diakses pada tanggal 26 februari 2022 pukul 15.30